

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening pada pemerintah daerah di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki kontribusi pengaruh sebesar 18,4%, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel intervening tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening memiliki kontribusi pengaruh sebesar 31,7%, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa kelemahan yang penulis temukan terkait dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan peranannya dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan dalam laporan keuangan dan mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah seperti masih kurangnya pemahaman aparatur fungsi akuntansi, masih kurang memadainya peraturan daerah yang mengatur petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah dan berbagai kelemahan lainnya, maka untuk dapat meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan berikut ini penulis mengajukan beberapa saran diantaranya:

1. Aparatur pemerintah daerah di Wilayah IV Provinsi Jawa Barat khususnya untuk fungsi akuntansi masih perlu untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan terutama dengan sangat dinamisnya perkembangan regulasi peraturan di lingkungan sektor pemerintahan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi media yang efektif agar aparatur terkait mengetahui prosedur akuntansi terbaru baik itu tentang pengelolaan keuangan daerah maupun standar akuntansi pemerintahan. Di samping itu, berdasarkan hasil

penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah sehingga aparatur fungsi akuntansi di lingkungan pemerintah daerah dituntut untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Inspektorat sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan review dan menilai kualitas laporan keuangan secara intern untuk pemerintah daerah harus berusaha mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dengan memberikan pengarahan dan pengawasan dalam rangka perbaikan atas hasil pemeriksaan dan temuan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga dengan hal tersebut, pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik guna meningkatkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah agar menyusun Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota yang mengatur petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini dilakukan agar aparatur fungsi akuntansi memiliki payung hukum yang lebih jelas dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, penulis menyarankan sebaiknya menambah variabel penelitian dengan efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia hal ini karena penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas sumber daya fungsi akuntansi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah terkait dengan metode akuntansi, kebijakan akuntansi, serta meliputi pengukuran dan penilaian merupakan persyaratan bagi pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga pemerintah wajib menerapkannya dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas, Kantor dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun diperluas untuk seluruh Dinas di Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Kota. Perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti.